



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
INSPEKTORAT UTAMA**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

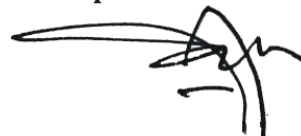
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan unit-unit kerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS dengan menciptakan penggunaan anggaran yang tertib dan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola anggaran secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAKIN Inspektorat Utama ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Inspektorat Utama selama tahun 2016 secara terperinci dan transparan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, juga sebagai evaluasi dan demi peningkatan kinerja Inspektorat Utama pada khususnya.

Jakarta, 1 Mei 2017

Inspektur Utama



Drs. Akhmad Jaelani M.Si
NIP. 19630621 198601 1 001

DAFTAR ISI

		hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
Daftar Lampiran		v
Ikhtisar Eksekutif		vi
Bab I	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Maksud dan Tujuan	2
1.3	Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
1.4	Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama	4
1.5	Sistematika Penyajian Laporan	7
Bab II	Perencanaan Kinerja	8
2.1	Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019	8
2.2	Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2016	11
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	13
3.1	Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2016	13
3.2	Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Utama	19
3.3	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra 2015-2019	19
3.4	Realisasi Anggaran Tahun 2016	21
Bab IV	Penutup	23
4.1	Tinjauan Umum	23
4.2	Tindak Lanjut	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai dengan Jabatan fungsional Auditor 2015-2016	6
Tabel 2	Tujuan dan Sasaran Strategis Inspekttorat Utama 2015-2019	10
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Inspekttorat Utama 2015-2016.....	11
Tabel 4	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan	13
Tabel 5	Jumlah Pengaduan Tahun 2015-2016.....	16
Tabel 6	Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis 2015-2016.....	19
Tabel 7	Capaian Kinerja 2016 terhadap Target Renstra 2015-2019	19
Tabel 8	Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Eselon II	21
Tabel 9	Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran 2015-2016.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sebaran Pegawai Inspektorat Utama	4
Gambar 2	Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Utama	5
Gambar 3	Jabatan Fungsional Pegawai inspektorat Utama	6
Gambar 4	Visi dan Misi Inspektorat Utama 2015-2019	9
Gambar 5	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama.....	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Susunan Organisasi Inspektorat Utama BPS	24
Lampiran 2	Renstra Inspektorat Utama BPS 2015-2019	25
Lampiran 3	RKT 2016	26
Lampiran 4	Perjanjian Kinerja 2016	28
Lampiran 5	Pengukuran Capaian Kinerja	29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Utama telah ditetapkan rencana strategis, serta visi dan misi yang memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Badan Pusat Statistik mempunyai peran yang signifikan untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam menghasilkan data yang terpercaya dan berkualitas.

Peran yang signifikan ini tergambar dalam visi Inspektorat Utama 2015-2019, yaitu, **“Inspektorat Utama yang professional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS.** Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat Utama yaitu Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu

1. Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas kinerja
2. Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan

Pencapaian sasaran tersebut ditetapkan dalam 1 (satu) program yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) BPS dengan anggaran sebesar Rp4.951.159.000,- dan daya serap sebesar 99,49% (Rp4.925.572.736,-).

Pencapaian atas sasaran strategis, IKU dan IKS tahun 2016 menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari 2 (dua) sasaran strategis, 7 (tujuh) IKU dan 7 (tujuh) IKS yang menjadi Penetapan Kinerja Inspektur Utama tahun 2016, 6 (enam) IKU dan 6 (enam) IKS terealisasi sesuai target. Sementara 1 (satu) IKU yang tidak tercapai pencapaiannya yaitu “Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)”.

Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.	Persentase rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti.	95,00	95,00
	Persentase satker yang memiliki penyimpangan dengan batas maksimal 3% dari DIPA.	90,00	102,67
	Persentase satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	100%	100%
	Persentase tingkat penyelesaian laporan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	100%	100%
	Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori B (baik)	66,67	100,00
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	3	2
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	0	0

Capaian IKS Inspektorat Utama Tahun 2016

Sasaran	Indikator	Targe t	Realisas i	Capaian Kinerja
Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.	Persentase rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti.	95,00	95,00	100,00
	Persentase satker yang memiliki penyimpangan dengan batas maksimal 3% dari DIPA.	90,00	102,67	102,67
	Persentase satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	100%	100%	100,00
	Persentase tingkat penyelesaian laporan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	100%	100%	100,00
	Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori B (baik)	66,67	100,00	150,00
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	3	2	66,67
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	0	0	0

Pencapaian kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2016 dengan rata-rata sebesar 103.22, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 87.26 persen.

Laporan Kinerja Inspektorat Utama ini diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2016 dan selanjutnya dapat digunakan dalam membuat rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama di masa mendatang.

1.1 Latar Belakang

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik (BPS) 2015-2019. Ada 4 (empat) tujuan yang harus dicapai BPS pada tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2015-2019, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, (3) Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, dan (4) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai pada tahun 2015.

Sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 07 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja BPS, tugas Inspektorat Utama adalah melakukan pengawasan fungsional, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tugas Inspektorat Utama ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2015 yang diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015 maupun Renstranya yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Inspektorat Utama periode 2015-2019. Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan, Inspektorat Utama terus berupaya meningkatkan kompetensi auditornya serta memperluas cakupan kegiatan pengawasannya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu: Audit Pengelolaan Keuangan Negara, Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi (Kinerja); Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) berupa Audit Investigasi; probity audit SE2016; Reviu Laporan Keuangan; Reviu RKA K/L; Reviu RK BMN; Reviu Laporan Kinerja; Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa (PB/J); Evaluasi Implementasi Sakip; Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern (SPI On-Line) dan Pemantauan/Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Selain itu Inspektorat Utama juga ditugasi menjadi penanggung jawab/pengelola layanan pengaduan (*Whistle Blowing System/WBS*), koordinator Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), pembangunan Zona Integritas, unit pengendalian gratifikasi, penanganan ijazah palsu, Unit Pemberantasan Pungli Sapu Bersih Pungutan Liar (UPP Saber Pungli), *Laisson Officer* (LO) BPK/BPKP dan memantau pelaksanaan pelaporan LHKPN/LHKASN.

Sejalan dengan peran internal audit modern sebagaimana dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors*, Inspektorat Utama menjalankan salah satu program dalam Rencana Strategis Badan Pusat Statistik 2010-2014, yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA). Peran pengawasan ini dilakukan untuk mengawal dan memastikan Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik terus berkelanjutan dalam mencapai *good governance and clean government*. Dalam rangka Reformasi Birokrasi di BPS, salah satu pilar yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama adalah area penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan merupakan suatu area perubahan fungsi dari semula hanya memiliki fungsi pengawasan, bertambah meliputi fungsi *Consulting* dan *Quality Assurance*, yang pada akhirnya dapat membantu mewujudkan visi Badan Pusat Statistik yaitu sebagai “*pelopor data statistik terpercaya untuk semua*”.

Pada awal tahun 2016, Inspektorat Utama menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2016. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (laporan capaian kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan. Namun dalam pelaksanaannya, PK tersebut telah mengalami dua kali revisi , yaitu pada bulan Juli dan September 2016. Hal ini disebabkan terjadinya penghematan anggaran sehingga indikator maupun target pada PK mengalami perubahan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Utama kepada Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran selama tahun 2016.

1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Kedudukan Inspektorat Utama BPS dalam struktur organisasi Badan Pusat Statistik sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 Tanggal 15 Februari 2008 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pusat Statistik. Inspektorat Utama BPS dipimpin oleh seorang Inspektur Utama dengan jabatan Eselon I, membawahi 3 (tiga) Eselon II yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah dan 1 (satu) Kepala Bagian Administrasi dengan 3 (tiga) Kepala Subbagian.

Tugas Inspektorat Utama seperti tercantum pada Bab IX Pasal 380 Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS adalah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Fungsi Inspektorat Utama sebagaimana tercantum dalam pasal 381, Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;
- b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
- c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

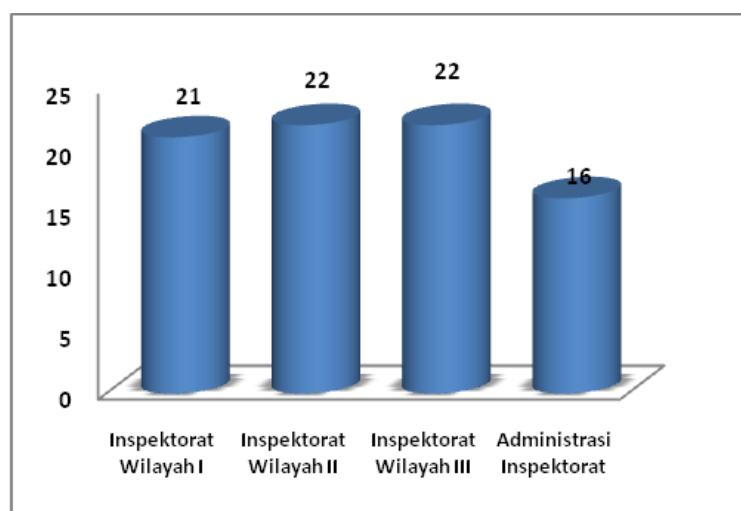
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Peraturan Dalam pasal 382 Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, susunan organisasi Inspektorat Utama terdiri dari:

- a. Inspektorat Wilayah I
- b. Inspektorat Wilayah II
- c. Inspektorat Wilayah III
- d. Bagian Administrasi, yang terdiri dari:
 - i. Subbagian Tata Usaha;
 - ii. Subbagian Penyusunan Program;
 - iii. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

1.4 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama

Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah pegawai di Inspektorat Utama pada Tahun 2016 adalah sebanyak 81 pegawai, meliputi:

- a. Komposisi Pegawai Menurut Unit Kerja



Gambar 1. Sebaran Pegawai Inspektorat Utama

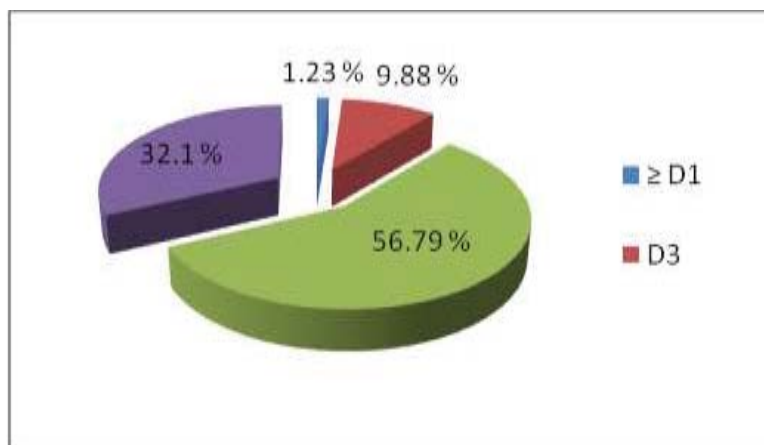
Berdasarkan gambar di atas, sebaran jumlah pegawai di masing-masing unit kerja inspektorat memang relatif merata. Pegawai Inspektorat Wilayah I sebanyak 21

pegawai. Wilayah II 22 pegawai, Wilayah III sebanyak 22 pegawai dan Bagian Administrasi sebanyak 16 orang (termasuk 3 orang sekretaris). Namun demikian Inspektorat Utama masih membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk menunjang tujuan organisasi.

b. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Pegawai Inspektorat Utama dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 1 orang, pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma III sebanyak 8 orang, pegawai memiliki pendidikan Diploma IV/S1, sebanyak 46 orang, dan 26 orang pegawai memiliki pendidikan Strata II. Dengan demikian sebanyak 72 orang atau lebih dari **88** persen pegawai BPS memiliki pendidikan Diploma IV/Strata I ke atas, jauh melampaui target instansi (Renstra BPS) sebesar 60%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan formal SDM Inspektorat Utama BPS sudah sangat baik.

Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah.

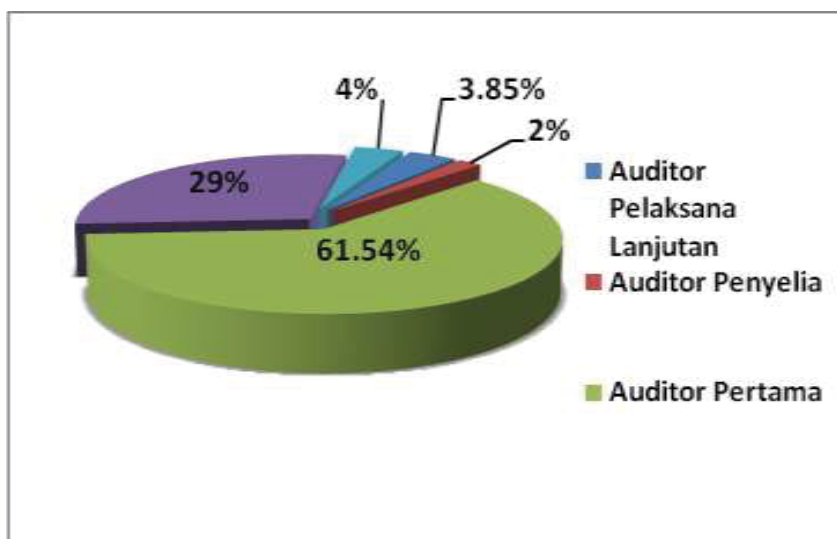


Gambar 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Utama

c. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan Fungsional Auditor

Di lingkungan Inspektorat Utama BPS terdapat 52 pegawai yang telah menjabat sebagai Fungsional Tertentu atau Fungsional Auditor, 22 pegawai sebagai Fungsional Umum, dan sisanya 7 pegawai sebagai Pejabat Struktural. Untuk jabatan Fungsional Auditor, dibagi kedalam beberapa jenjang jabatan mulai dari tingkat

terendah sampai dengan yang tertinggi. Untuk diketahui bahwa seluruh pegawai Inspektorat Utama baik pejabat fungsional umum maupun pejabat struktural (Es III dan IV), minimal sudah memiliki sertifikat pembentukan auditor sesuai tingkat pendidikannya. Komposisi pegawai Inspektorat Utama menurut jenjang Jabatan Fungsional Auditor dirinci pada tabel 1.



Gambar 3. Jabatan Fungsional Pegawai Inspektorat Utama

Tabel 1. Jumlah Pegawai dengan Jabatan Fungsional Auditor 2015-2016

Jenjang Jabatan Fungsional Auditor	Jumlah Pegawai	
	2015	2016
1. Auditor Trampil	5	3
- Auditor Pelaksana	3	1
- Auditor Pelaksana lanjutan	0	1
- Auditor Penyelia	2	1
2. Auditor Ahli	32	49
- Auditor Pertama	22	32
- Auditor Muda	8	15
- Auditor Madya	2	2
- Auditor Utama	0	0

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Inspektorat Utama tahun 2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di Inspektorat Utama, potensi dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Utama; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2016.
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2016, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Utama, Capaian Kinerja Inspektorat Utama terhadap Target Renstra 2015-2019 dan Realisasi Anggaran tahun 2016
- Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019

Visi Inspektorat Utama adalah “Inspektorat Utama yang professional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS”. Inspektorat Utama turut berkontribusi dalam BPS yang akuntabel.

Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa auditor Inspektorat Utama, baik secara individu maupun tim, harus memiliki sikap profesional, berintegritas dan amanah dalam menjalankan perannya sebagai APIP, serta mampu menjadi penjamin kualitas seluruh kegiatan BPS, khususnya penyelenggaraan statistik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Akuntabel disini berarti bahwa pengelolaan sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka pencapaian tujuan, telah dipertanggungjawabkan secara baik dan benar kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan/pertanggungjawaban.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. *Mewujudkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik;*

“Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang profesional diharapkan terus meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui pengawasan yang terprogram, terarah dan telah berbasis risiko (*risk based audit*), pengidentifikasian penyimpangan, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada auditan, dan penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan serta diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya mampu mendorong tata pemerintahan yang baik”.

2. *Meningkatkan kompetensi dan integritas pengawas;*

“Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang profesional dan berintegritas diharapkan terus meningkatkan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) auditor, baik diklat penjenjangan maupun diklat teknis substantif, seminar, dan

workshop di bidang pengawasan, serta peningkatan integritas pengawas dengan penerapan *core value* BPS dan kode etik auditor”.

3. *Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan barang yang akuntabel;*

“Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab”.

4. *Mendukung capaian Reformasi Birokrasi (RB) pada pilar penguatan pengawasan; dan*

“Inspektorat Utama berperan dalam mewujudkan capaian Reformasi Birokrasi, serta mendukung peningkatan penguatan pengawasan melalui pembangunan zona integritas (ZI)”.

5. *Mewujudkan penjaminan kualitas kinerja kegiatan statistik.*

“Penjaminan kualitas yang dilakukan Inspektorat Utama merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan statistik telah sesuai dengan acuan nasional, kebijakan, strategi dan standar yang ditetapkan”.



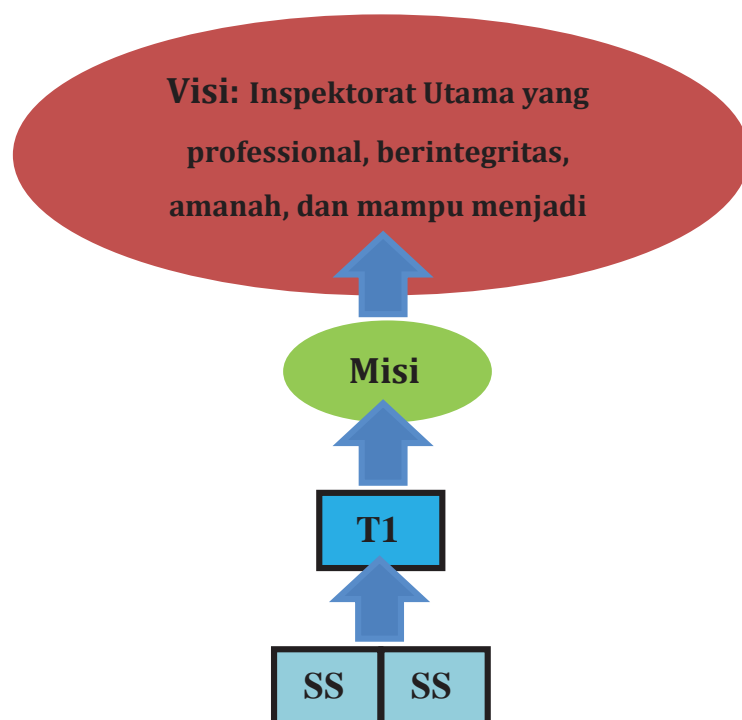
Gambar 4. Visi dan Misi Inspektorat Utama 2015-2019

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Utama 2015-2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai yang memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Memastikan ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan
	Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas kinerja

Tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2016

Pada awal tahun, ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Di tahun 2016, kegiatan Sensus Ekonomi 2016 (SE'2016) mulai dilaksanakan. Dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara benar, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, Inspektorat Utama melakukan *probity audit* atas kegiatan SE'2016 yang merupakan kegiatan baru di tahun 2016 selain kegiatan pengukuran efektifitas efisiensi, dan ekonomis penyelenggaraan sensus dan survey serta pengukuran kesesuaian perencanaan anggaran dengan kaidah penganggaran. Target Perjanjian Kinerja 2016 (revisi kedua), dapat dilihat pada tabel berikut beserta target Perjanjian Kinerja 2015 sebagai perbandingan.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama 2015 dan 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015	Target 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
T1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Tingkat ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persen	88,00	91,00
SS1. Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan	Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	90,00	95,00
	Tingkat penyimpangan satker dengan penyimpangan kurang dari tiga persen DIPA (dari 144 satker yang diperiksa tahun 2015 dan 117 satker yang diperiksa tahun 2016)	Persen	90,00	90,00
	Tingkat satker dengan penyusunan Laporan Keuangan telah sesuai SAP (dari 36 satker yang diperiksa)	Persen	100,00	100,00
	Tingkat penyelesaian laporan	Persen	100,00	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015	Target 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
	pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya			
SS2. Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas kinerja	Tingkat satker dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP kategori baik (dari 36 satker yang diperiksa)	Persen	60,00	66,67
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS)	Satker	8	3
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS)	Satker	4	0
	Tingkat penyelenggaraan kegiatan sensus dan survei yang efektif, efisien, dan ekonomis	Persen		n.a.
	Tingkat kesesuaian perencanaan anggaran dengan kaidah penganggaran	Persen		100,00
	Tingkat <i>probity audit</i> yang telah ditindaklanjuti	Persen		100,00

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Inspektur Utama kepada Kepala BPS atas penggunaan anggaran Inspektorat Utama.

3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2016

Capaian kinerja Inspektorat Utama 2016 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2016. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK 2016 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut.

Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan pertama adalah Peningkatan birokrasi yang akuntabel, diukur dengan indikator Persentase tingkat ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja. Tujuan pertama dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan, (2) Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas kinerja. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel				
Persentase tingkat ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persen	90,00	92,89	103,22
SS1. Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan				
Persentase tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	95,00	95,00	100,00
Persentase tingkat satker dengan penyimpangan kurang dari 3% DIPA (dari 117 satker yang diperiksa)	Persen	90,00	102,67	102,67
Persentase tingkat satker dengan penyusunan laporan keuangan telah sesuai SAP (dari 36 satker	Persen	100,00	100,00	100,00

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
yang diperiksa)				
Persentase tingkat penyelesaian laporan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	Persen	100,00	100,00	100,00
SS2. Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas kinerja				
Persentase tingkat satker dengan memperoleh nilai evaluasi SAKIP kategori baik (dari 36 satker yang diperiksa)	Persen	66,67	100,00	150,00
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS)	Satker	3	2	66,67
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS)	Satker	0	0	0
Persentase tingkat penyelenggaraan kegiatan sensus dan survei yang efektif, efisien, dan ekonomis	Persen	n.a.	n.a.	n.a.
Persentase tingkat kesesuaian perencanaan anggaran dengan kaidah penganggaran	Persen	100,00	100,00	100,00
Persentase tingkat <i>probit audit</i> yang telah ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				103,22

Sasaran 1 :Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan

IKS 1.1 : Persentase tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti

Target persentase tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti untuk tahun 2016 sebesar 95% dan realisasinya juga sebesar 95%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Tercapainya indikator target dari indikator tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti ini adalah dikarenakan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Utama telah berjalan efektif yaitu dengan cara:

1. Membentuk tim auditor di masing-masing Inspektorat Wilayah yang khusus melakukan monitoring/pemantauan
2. Auditor melakukan pelaporan atas hasil monitoring/pemantauan berupa rekapitulasi penyelesaian tindaklanjut secara triwulanan pada tahun berjalan.
3. Bila diperlukan, akan dilakukan teguran kepada satker yang belum selesai menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Utama.

Capaian ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya (2015) yang capaiannya hanya sebesar 96,67% karena realisasinya hanya 87% dibanding 90% yang ditargetkan.

IKS 1.2 : Persentase tingkat satker dengan penyimpangan kurang dari 3% DIPA (dari 177 satker yang diperiksa)

Pada tahun 2016, target presentase satker yang memiliki penyimpangan dengan batas maksimal 3% dari DIPA adalah 92% dengan realisasinya sebesar 71 %. Dari total 117 satker yang diperiksa, terdapat 77 satker yang memiliki penyimpangan dengan batas maksimal 3% dari DIPA. Sedangkan pada tahun 2015, target yang harus dicapai sebanyak 90% dengan realisasinya sebesar 90,90% Dari total 144 satker yang diperiksa, terdapat 131 satker yang memiliki penyimpangan dengan batas maksimal 3% dari DIPA.. Tahun 2014, target yang harus dicapai juga sebanyak 90% satker yang diperiksa namun memiliki penyimpangan dengan batas maksimal yang lebih tinggi, yaitu 5%.

Capaian keberhasilan ini diantaranya dikarenakan bertambahnya frekuensi audit dan penetapan audit berbasis risiko, serta adanya sinergitas BPS Provinsi dengan Inspektorat Utama berupa undangan BPS Provinsi kepada Auditor untuk menjadi narasumber. Selama tahun 2015, Inspektorat Utama dibantu BPS Provinsi menyelenggarakan workshop/bimtek focus pada materi : temuan berulang hasil audit Inspektorat, SPIP dan Evaluasi SAKIP pada 8 (delapan) BPS Provinsi yang pesertanya adalah KPA, PPK dan Kasubag TU BPS Kabupaten/Kota (selain pejabat dan pengelola keuangan di BPS Provinsi) .

Dalam perannya sebagai konsultansi (*consulting*), Inspektorat Utama melalui auditornya juga banyak melayani (*by phone*) beragam konsultansi dari satuan kerja yaitu terkait tertib pengelolaan keuangan dan BMN, kegiatan kerjasama antara BPS dengan K/L/I lain termasuk Pemerintah Daerah.

IKS 1.3 : Persentase tingkat satker dengan penyusunan laporan keuangan telah sesuai SAP (dari 36 satker yang diperiksa)

Pada tahun 2016, capaian kinerja dari presentase satker dengan penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebesar 100% dari 36 satker yang diperiksa. Pencapaian untuk indikator ini pada tahun 2016, tercapai sesuai dengan target yaitu dari 36 satker yang diperiksa dalam penyusunan laporan keuangannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Capaian ini masih sama dengan capaian tahun 2015.

IKS 1.4 : Persentase tingkat penyelesaian laporan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya

Target presentase penyelesaian laporan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya untuk tahun 2016 adalah sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Hal ini berarti seluruh pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Utama telah diselesaikan, walaupun jumlah pengaduan yang masuk meningkat menjadi 76 pengaduan dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar 49 pengaduan. *Whistleblowing systems* (WBS) merupakan aplikasi yang disediakan oleh BPS bagi pegawai, masyarakat, dan organisasi/ lembaga swadaya yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS. Aplikasi WBS diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengaduan dan meningkatkan penanganan atas pengaduan tersebut.

Jumlah dan jenis pengaduan melalui *Whistleblowing System* (WBS) dari Tahun 2015-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Pengaduan Tahun 2015-2016

Tahun	Jumlah Pengaduan	Jenis Pengaduan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
2015	49	15	4	0	0	0	0	0	30
2016	76	7	0	2	3	24	3	4	33

Keterangan Jenis Pengaduan:

1. Korupsi, kecurangan dan kejujuran
2. Melanggar hukum
3. Pelanggaran ketentuan perpajakan atau peraturan perundang-undangan lainnya
4. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara
5. Pelanggaran SOP BPS yang bersifat administratif
6. Pelanggaran etika PNS / pelanggaran norm-norma kesopanan pada umumnya
7. Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat teknis
8. Bersifat saran dan pertanyaan

Sasaran 2 : Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas kinerja

IKS 2.1 : Persentase tingkat satker dengan memperoleh nilai evaluasi SAKIP kategori baik (dari 36 satker yang diperiksa)

Target persentase satker yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP kategori baik pada tahun 2016 adalah sebesar 66,67% (dari rencana 36 satker sampel yang diperiksa, 24 satker berkategori baik nilainya). Namun realisasinya satker yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP dengan kategori baik adalah sebanyak 36 satker atau 100% dari sampel satker yang diperiksa, sehingga capaian kinerja mencapai 150%. Hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 sebelumnya yaitu, target persentase satker yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP kategori baik pada tahun 2015 adalah sebesar 60% dari rencana 36 satker sampel yang diperiksa. Realisasi satker yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP dengan kategori baik adalah sebanyak 22 satker atau 61,00% dari sampel satker yang diperiksa.

IKS 2.2 : Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS)

Seusai penancangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di tahun 2014, BPS telah membuktikan komitmennya dengan upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan sebagai bukti, pada tahun itu, BPS Provinsi Sulawesi Barat menerima penghargaan zona integritas untuk kategori daerah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB.

Pada Tahun 2016, Tim Penilai Internal BPS telah melakukan *field review* (berdasarkan hasil self assestment) di 7 unit kerja terpilih. Dari hasil penilaian TPI, 2

(dua) unit kerja dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan kepada Kementerian PAN-RB untuk dilakukan review penilaian oleh Tim Penilai Nasional untuk ditetapkan menjadi unit kerja berpredikat WBK. Namun sehubungan dengan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2015 yang mendapat opini WDP, kedua unit kerja tersebut tidak dapat diusulkan untuk dinilai oleh Tim Penilai Nasional, sehingga hanya mendapatkan predikat WBK dengan SK KBPS. Ke 2 (dua) unit kerja tersebut adalah BPS Provinsi Bali dan BPS Kabupaten Padang Pariaman.

Hal ini berbeda jauh dengan tahun sebelumnya yaitu di tahun 2015, jumlah satker yang berpredikat WBK dengan SK KBPS sebanyak 9 satker.

IKS 2.3 Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS)

Pada tahun 2016, BPS tidak menargetkan satker berpredikat WBBM karena BPK RI memberikan opini WDP atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2015. Dengan opini tersebut, Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN-RB) tidak dapat melakukan penilaian satker yang berpredikat WBBM berdasarkan SK Kepala BPS tersebut.

Tahun sebelumnya, BPS Provinsi Sulawesi Barat memperoleh predikat WBBM dari Kementerian PAN-RB.

Kendala:

Tidak tercapainya indikator “Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS)” dikarenakan hasil dari penilaian oleh KemenPAN RB, tidak ada satker yang memperoleh predikat WBK.

Opini BPK RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BPS tahun 2015 adalah WDP, sehingga penilaian oleh KemenPAN RB tidak dapat dilakukan.

Solusi :

Pendampingan/reviu terhadap satker WBK (SK KBPS) agar berpredikat WBK oleh TPN akan lebih ditingkatkan terutama dalam penyiapan kelengkapan bukti dukung untuk penilaian.

Berdasarkan tabel di atas, tujuan telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar **103,22** persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis sebesar 87,26 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan telah tercapai. Namun, jika dilihat dari masing-masing indikator, ada indikator sasaran strategis yang menunjukkan

capaiannya kurang dari 100 persen, yaitu indikator “Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS)” capaian kinerjanya sebesar 66.67persen.

Meskipun tujuan telah tercapai, namun upaya peningkatan birokrasi yang akuntabel terus dilakukan oleh Inspektorat Utama. Upaya peningkatan birokrasi yang akuntabel dilakukan melalui pembinaan yang dilakukan secara kontinyu oleh Inspektorat Utama.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Utama

Perkembangan capaian kinerja 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis 2015-2016

Uraian	2015	2016
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan	87,26	103,22
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis	87,26	103,22

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja tujuan maupun sasaran strategis menunjukkan kenaikan, walaupun di tahun 2016 terdapat penghematan anggaran. Hal ini dipengaruhi pula oleh penurunan target dalam penetapan kinerjanya.

3.3. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra 2015-2019

Capaian kinerja BPS terhadap target Renstra 2015-2019 dihitung berdasarkan realisasi 2016 terhadap target 2016 pada Renstra 2015-2019. Capaian kinerja BPS terhadap target Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Capaian Kinerja 2016 terhadap Target Renstra 2015-2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel				
Persentase tingkat ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan dan	Persen	90,00	92.89	103,22

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
kinerja				
SS1. Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan				
Persentase tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	95,00	95,00	100,00
Persentase tingkat satker dengan penyimpangan kurang dari 3% DIPA (dari 117 satker yang diperiksa)	Persen	90,00	102,67	102,67
Persentase tingkat satker dengan penyusunan laporan keuangan telah sesuai SAP (dari 36 satker yang diperiksa)	Persen	100,00	100,00	100,00
Persentase tingkat penyelesaian laporan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	Persen	100,00	100,00	100,00
SS2. Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas kinerja				
Persentase tingkat satker dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP kategori baik (dari 36 satker yang diperiksa)	Persen	66,67	66,67	100,00
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS)	Satker	3	2	66,67
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS)	Satker	0	0	0
Tingkat penyelenggaraan kegiatan sensus dan survei yang efektif, efisien, dan ekonomis	Persen	n.a.	n.a.	n.a.
Tingkat kesesuaian perencanaan anggaran dengan kaidah penganggaran	Persen	100,00	100,00	100,00
Tingkat <i>probity audit</i> yang telah ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rata-rata Capaian Indikator Tujuan				103,22
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				103,22

Secara keseluruhan tahun 2016, target tujuan serta target masing-masing sasaran strategisnya telah tercapai. Rata-rata capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis sebesar 103,22 %, hal ini meningkat disbanding tahun 2015 sebesar 87,26 %.

3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2016

Pagu yang diberikan ke Inspektorat Utama untuk menjalankan fungsinya selama tahun 2016 adalah sebesar **4,951 milyar rupiah**, terbagi ke dalam 3 (tiga) eselon II, yaitu: (1) Inspektorat Wilayah I, (2) Inspektorat Wilayah II, (3) Inspektorat Wilayah III.

Awalnya, pagu anggaran untuk tahun 2016 sebesar Rp. 9.219.463.000,- namun dalam perjalanannya mengalami penghematan menjadai sebesar Rp. 5,951,868,000,- dibulan Juli 2016 dan menjadi sebesar Rp. 4.951.159.000,- di bulan Okteber 2016

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran 2015-2016 Menurut Eselon II

Eselon II	2015			2016		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Inspektorat Wilayah I	2.370.840.000,-	2.142.530.783,-	90,00	1.664.148.000,-	1.657.787.085,-	99.62
Inspektorat Wilayah II	2.381.034.000,-	2.160.192.427,-	90,72	1.544.896.000,-	1.538.275.801,-	99.57
Inspektorat Wilayah III	2.344.226.000,-	2.129.330.412,-	90,83	1.742.115.000,-	1.729.509.850,-	99.28
Total	7.096.100.000,-	6.432.053.622,-	90,52	4.951.159.000,-	4.925.572.736,-	99.49

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program PPAA tahun 2016 adalah sebesar 99,49 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (2015) yang hanya sebesar 90,52 persen.

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong K/L untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 dan tahun 2016 menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran
2015-2016**

Program	2015		2016	
	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Inspektorat Wilayah I	92.42	90,00	104,67	99.62
Inspektorat Wilayah II	83.48	90,72	103,78	99.57
Inspektorat Wilayah III	102.09	90,83	98,00	99.28
Rata-rata	98,71	90,52	102,15	99.49

4.1. Tinjauan Umum

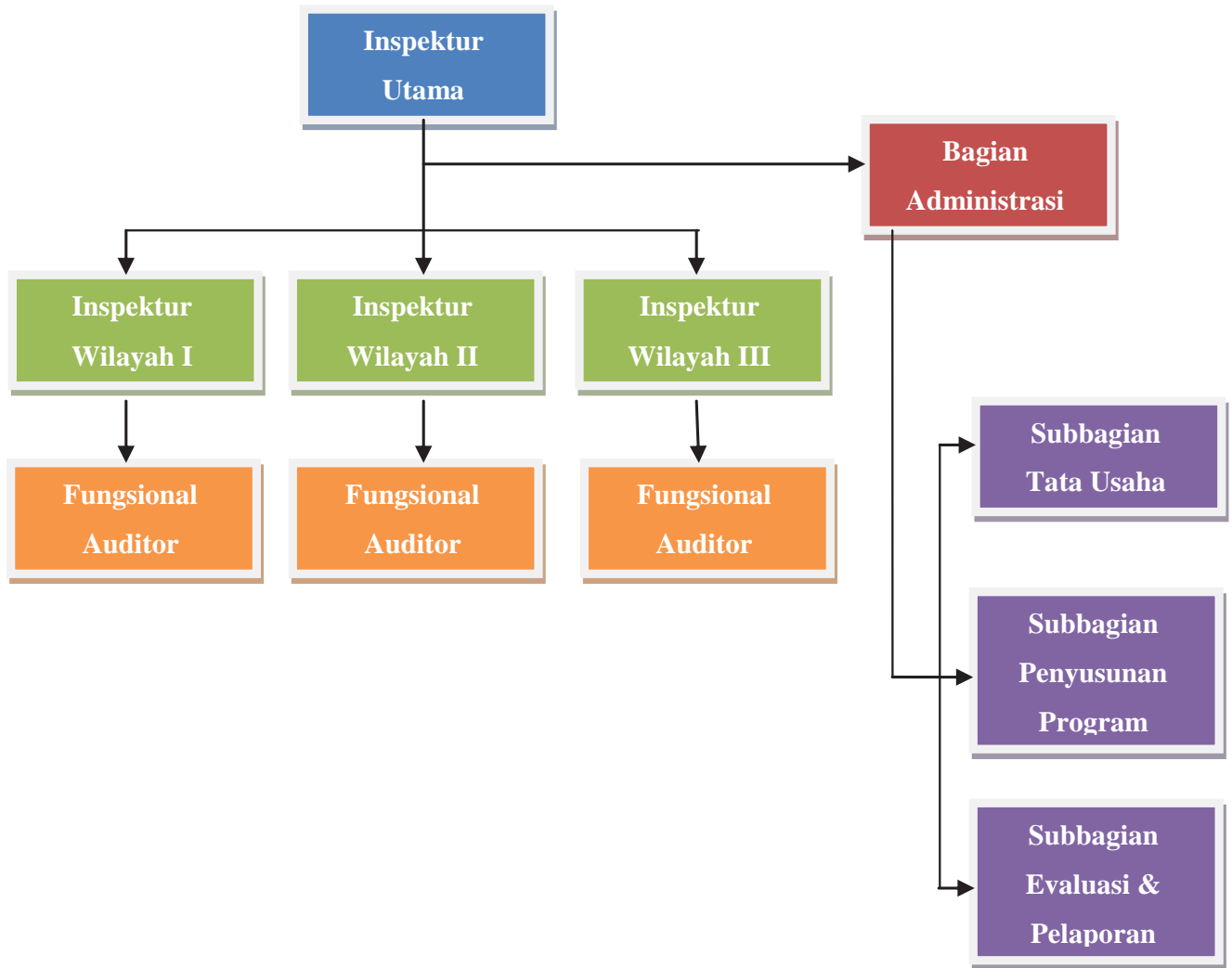
Ada 1 (satu) tujuan yang harus dicapai Inspektorat Utama pada tahun 2016, yaitu Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan tersebut memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang harus dicapai. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Utama tahun 2016 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 103,22. Meskipun demikian upaya-upaya peningkatan kinerja terus dilakukan oleh Inspektorat Utama, terutama dalam hal pemenuhan dan peningkatan jumlah satker yang berpredikat WBK dan WBBM serta meningkatkan pembinaan dalam pengelolaan keuangan agar opini WTP dari BPK RI atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan, dapat diraih kembali di tahun-tahun berikutnya.

4.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah: Meningkatkan pembinaan dalam bentuk pendampingan/reviu terutama dalam penyiapan kelengkapan bukti dukung untuk penilaian, ke unit kerja yang akan dicalonkan memperoleh predikat WBK/WBBM berdasarkan evaluasi hasil *self assessment* agar memperoleh predikat WBK/WBBM dari Kementerian PAN dan RB.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi Inspektorat Utama BPS



Lampiran 2. Renstra Inspektorat Utama BPS 2015-2019

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Inspektorat Utama BPS						
	1. Memastikan penyelenggaraan kegiatan statistik yang ekonomis, efektif, dan efisien					
	1.1. Presentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori baik	60%	70%	80%	90%	100%
	1.2. Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK	6	6	6	6	6
	1.3. Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBM	2	3	3	3	3
	1.4. Tingkat penyelenggaraan kegiatan sensus dan survey yang ekonomis, efektif, dan efisien	100%	100%	100%	100%	100%
	SS.2. Memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan					
	2.1. Tingkat kesesuaian perencanaan anggaran dengan kaidah penganggaran	90%	92%	94%	96%	100%
	2.2. Tingkat rekomendasi <i>probity</i> audit yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	SS.3. Meningkatnya kapabilitas APIP					
	3.1. Jumlah auditor yang memiliki sertifikasi minimal 5 (lima) jenis diklat bidang pengawasan	15	30	45	60	75
	3.2. Tingkat leveling kapabilitas APIP	1	2	2	3	3
	SS.4. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
	4.1. Tingkat rekomendasi inspektorat utama yang telah selesai ditindaklanjuti	90%	95%	100%	100%	100%
	4.2. Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
	4.3. Tingkat penyimpangan satker dengan batas maksimal 3% dari DIPA (dari satker yang diperiksa)	90%	92%	94%	96%	100%
	4.4. Tingkat kesesuaian Laporan Keuangan satker dengan SAP (dari satker yang diperiksa)	100%	100%	100%	100%	100%

Lampiran 3. RKT 2016

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator		Satuan	Target	Anggaran (ribu Rupiah)
(1)		(2)	(3)	(4)
IT.1.1. Tingkat ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja				
SS.1. Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan	<i>IKSS.1.1. Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah ditindaklanjuti</i>	Persentase	95%	-
	<i>IKSS.1.2. Tingkat satker yang memiliki penyimpangan dengan batas maksimal 3% dari DIPA (dari satker yang diperiksa)</i>	Persentase	90%	3.533.011
	<i>IKSS.1.3. Tingkat satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan standard SAP (dari satker yang diperiksa)</i>	Persentase	100%	450.672
	<i>IKSS.1.4. Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya</i>	Persentase	100%	
SS.2. Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas kinerja	<i>IKSS.2.1. Tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)</i>	Persentase	66.67%	468.013
	<i>IKSS.2.2. Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK</i>	Satker	3	
	<i>IKSS.2.3. Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM</i>	Satker	0	

Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator		Satuan	Target	Anggaran (ribu Rupiah)
(1)		(2)	(3)	(4)
	<i>IKSS.2.4. Tingkat penyelenggaraan kegiatan sensus dan survei yang efektif, efisien, dan ekonomis</i>	Persen	n.a.	
	<i>IKSS.2.5. Tingkat kesesuaian perencanaan anggaran dengan kaidah penganggaran</i>	Persen	100%	
	<i>IKSS.2.6. Tingkat probity audit yang telah ditindaklanjuti</i>	Persen	100%	

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
T1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Tingkat ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persen	90,00
SS1. Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan	Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	95,00
	Tingkat penyimpangan satker dengan penyimpangan kurang dari tiga persen DIPA (dari 117 satker yang diperiksa)	Persen	90,00
	Tingkat satker dengan penyusunan Laporan Keuangan telah sesuai SAP (dari 36 satker yang diperiksa)	Persen	100,00
	Tingkat penyelesaian laporan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	Persen	100,00
SS2. Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas kinerja	Tingkat satker dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP kategori baik (dari 36 satker yang diperiksa)	Persen	66,67
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS)	Satker	3
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS)	Satker	0
	Tingkat penyelenggaraan kegiatan sensus dan survei yang efektif, efisien, dan ekonomis	Persen	n.a.
	Tingkat kesesuaian perencanaan anggaran dengan kaidah penganggaran	Persen	100,00
	Tingkat <i>probity audit</i> yang telah ditindaklanjuti	Persen	100,00

Lampiran 5. Pengukuran Capaian Kinerja 2016

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T1	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Tingkat ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persen	2016	90,00	76.79	87,26
SS 1	Meningkatnya ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan	Persentase tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	2016	95,00	100,00	96,67
		Persentase tingkat satker dengan penyimpangan kurang dari 3% DIPA (dari 117 satker yang diperiksa)	Persen	2016	90,00	102,67	100,00
		Persentase tingkat satker dengan penyusunan laporan keuangan telah sesuai SAP (dari 36 satker yang diperiksa)	Persen	2016	100,00	100,00	100,00
		Persentase tingkat	Persen	2016	100,00	100,00	100,00

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penyelesaian laporan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya					
SS 2	SS2. Meningkatkan ketaatannya satker dalam akuntabilitas kinerja	Persentase tingkat satker dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP kategori baik (dari 36 satker yang diperiksa)	Persen	2016	66,67	61,00	101,67
		Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS)	Satker	2016	3	9	112,50
		Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS)	Satker	2016	0	0	0
		Persentase tingkat penyelenggaraan kegiatan sensus dan survei yang efektif, efisien,	Persen	2016	n.a.		

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan ekonomis					
		Persentase tingkat kesesuaian perencanaan anggaran dengan kaidah penganggaran	Persen	2016	100,00		
		Persentase tingkat <i>probity audit</i> yang telah ditindaklanjuti	Persen	2016	100,00		

EFFECTIVENESS

EFFICIENCY

ECONOMY



**BADAN PUSAT STATISTIK
INSPEKTORAT UTAMA**

Jl. Dr. Soetomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291

Email : bpshq@bps.go.id